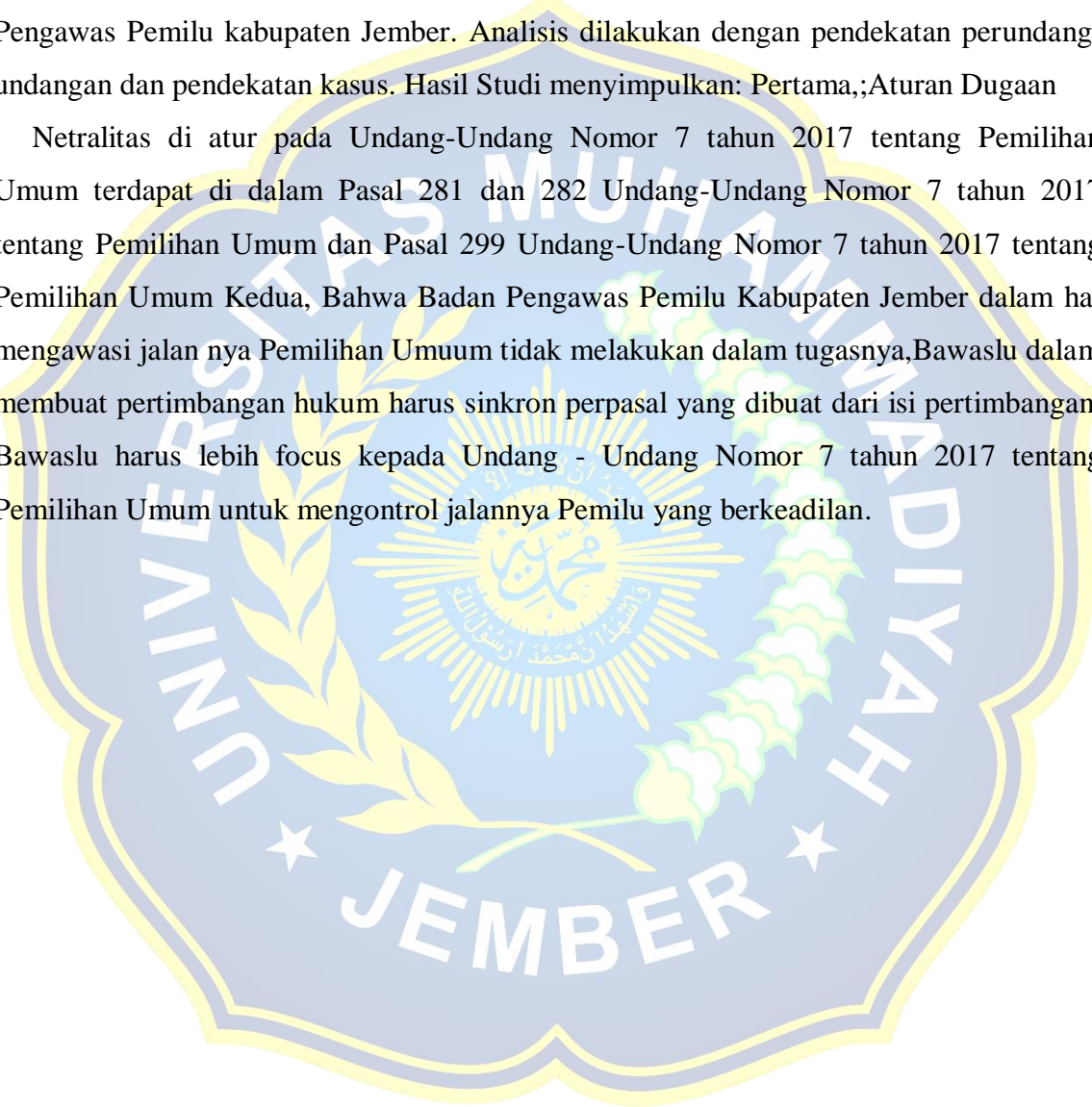


ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis tentang Aturan Netralitas Kepala Daerah dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi terhadap deklarasi dukungan kepada calon anggota DPR RI oleh Bupati Jember Periode 2016-2021) Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Pertama, Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Studi menyimpulkan: Pertama,;Aturan Dugaan

Netralitas di atur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat di dalam Pasal 281 dan 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kedua, Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam hal mengawasi jalannya Pemilihan Umum tidak melakukan dalam tugasnya, Bawaslu dalam membuat pertimbangan hukum harus sinkron perpasal yang dibuat dari isi pertimbangan, Bawaslu harus lebih focus kepada Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengontrol jalannya Pemilu yang berkeadilan.



ABSTRACT

This study aims to find out the Analysis of the Regional Head Neutrality Rules in the Election of President and Vice President 2019 (Study of the declaration of support for candidates for members of the Republic of Indonesia by the Regent of Jember for the period of 2016-2021) Formulation of the problem proposed, namely: First, this research includes legal juridical research empirical. Research data were collected by means of literature study and interviews with the Jember Regency Election Supervisory Board. The analysis was carried out using the statutory approach and the case approach. The Study Results conclude: First,; Rules of Allegation

Neutrality is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections contained in Article 281 and 282 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Article 299 of Law Number 7 of 2017 concerning Secondary General Elections, That the Election Supervisory Body Jember Regency in terms of overseeing the course of the Election of General Election does not carry out its duties, Bawaslu in making legal considerations must be synchronized in accordance with the contents of the consideration, Bawaslu must focus more on Law No. 7 of 2017 on General Elections to control the course of equitable elections.